



**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2017**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA)
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2017**



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Sriwijaya Nomor 44 Pekalongan Kode Pos 51111
Telepon (0285) 423223 Faksimili (0285) 423223-303 e-mail: bappeda@pekalongankota.go.id
Website: <http://bappeda.pekalongankota.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 050/ 2464 /2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH NOMOR : 050/0315/2016
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050/0319/2016 telah ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja;
 - c. bahwa sebagai akibat terjadinya penambahan dan/ pengurangan kegiatan, pergeseran rekening, dan penambahan target kinerja perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor : 050/0315/2016 Tentang Perubahan Rencana kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019;
 10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
 12. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017;
 13. Keputusan Kepala Bappeda Kota Pekalongan Nomor : 050/0315/2016 tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017, adalah perubahan dokumen perencanaan Tahun 2017 yang dimulai sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- (2) Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Bappeda setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2017 dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Semester II Tahun 2017;
- c. Bab III Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. Bab IV Penutup.

Pasal 3

Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 Juli 2017

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN



DAFTAR ISI

Keputusan Kepala BAPPEDA	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Landasan Hukum	I-2
1.2 Maksud Dan Tujuan	I-5
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan.....	I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017	II-1
2.1 Realisasi Target Knerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja Tahun 2017	II-1
2.2 Kesesuaian Program dan Kegiatan di Rencana Kerja dengan APBD	II-4
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017.....	III-1
3.1 Rekapitulasi perubahan kegiatan Renja Tahun 2017	III-1
3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Renja Tahun 2017	III-7
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 206 dan 2017.....	I-7
Tabel 1.2 Target Pendapatan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2017	I-9
Tabel 1.3 Anggaran Pembiayaan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017	I-12
Tabel 2.1 Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2017	II-1
Tabel 2.2 Realisasi Target Kinerja Triwulan II dan Kesesuaian Renja Bappeda dengan APND 2017	II-6
Tabel 3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan pada Renja Perubahan Bappeda Kta Pekalongan Tahun 2017	III-1
Tabel 3.2 Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran pada Renja Perubahan Tahun 2017.....	III-2
Tabel 3.3 Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran pada Renja Perubahan 2017	III-5
Tabel 3.4 Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran pada Renja Tahun 2017	III-5
Tabel 3.5 Kegiatan Yang Dihapus pada Renja Perubahan Tahun 2017	III-6
Tabel 3.6 Kegiatan Baru pada Renja Perubahan Tahun 2017	III-7
Tabel 3.7 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Perubahan Renja Tahun 2017	III-8

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan peluang otonomi seluas-luasnya maka kewenangan diberikan kepada daerah. Hal ini merupakan peluang untuk memberikan kemajuan pembangunan dengan ciri khas dan potensi daerah dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya masyarakat daerah tersebut. Salah satu hal yang mendukung dalam upaya mencapai tujuan pelayanan publik adalah dengan pelaksanaan rencana daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif melalui beberapa tahapan perencanaan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan yang terbagi dalam dua fase, yakni Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan bahan awal untuk pembahasan dalam musrenbang tingkat Perangkat Daerah sebagai upaya perencanaan partisipatif dengan pendekatan *bottom up* dan *top down* proses dimana partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait sangat diperlukan guna menetapkan Rancangan Renja menjadi Renja definitif Perangkat Daerah sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKPD Kota Pekalongan. Penyusunan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan 2017 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017.

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2017 yang telah disusun dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 telah dilakukan perubahan, hal tersebut seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 memuat aturan bagi Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan Organisasi Perangkat Daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana dalam point KEDUA disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota untuk segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5).

Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2017. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017.

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya;
 24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum

- Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Pekalongan Tahun 2004-2013;
25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
 26. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
 27. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
 28. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 29. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Perubahan kedua Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017.

Adapun tujuan penyusunan perubahan kedua rencana kerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017 adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, berbagai alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat

ataupun Pemerintah Provinsi yang diterima setelah penetapan APBD, maka harus diakomodir dalam Perubahan APBD. Selanjutnya berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang nantinya dituangkan dalam dokumen APBD, secara logis harus diawali dengan penyusunan ataupun perubahan RKPD. Hal ini sesuai dengan Pasal 265 (3) jo. Pasal 311 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang intinya bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Hal ini karena tugas Kepala daerah yang wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD untuk dibahas bersama DPRD, harus berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. Dengan demikian, Perubahan APBD, pada dasarnya harus diawali dengan Perubahan RKPD. Dasar pertimbangan perubahan RKPD meliputi: (1) perubahan asumsi ekonomi, (2) perubahan kebijakan pendapatan, (3) perubahan kebijakan belanja dan (4) perubahan kebijakan pembiayaan.

1.3.1. Perubahan Asumsi Ekonomi Daerah

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah. Perubahan asumsi indikator makro ekonomi sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN-P Tahun 2017, secara nasional terjadi perubahan yang tentunya berdampak pula terhadap kondisi ekonomi daerah yang cenderung akan memberikan pengaruh terhadap indikator makro ekonomi lokal Kota Pekalongan. Berdasarkan realisasi dan prospek perekonomian global dan domestik terkini, beberapa indikator asumsi dasar ekonomi makro tahun 2017 diusulkan untuk disesuaikan. Melihat potensi kuatnya konsumsi rumah tangga dan membaiknya kinerja ekspor sampai dengan akhir tahun, outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,2 persen, atau lebih tinggi dari asumsinya dalam APBN tahun 2017 sebesar 5,1 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 juga akan didukung oleh keberlanjutan proyek infrastruktur serta potensi masuknya aliran modal ke dalam negeri pasca peningkatan rating menjadi investment grade oleh lembaga rating Standard & Poor's (S&P) yang diharapkan akan mendorong kinerja dari sisi investasi. Sementara itu, laju inflasi pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 4,3 persen atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan asumsi inflasi APBN tahun 2017 sebesar 4,0 persen. Tekanan inflasi sampai dengan akhir tahun 2017 diperkirakan akan sejalan dengan tren peningkatan harga minyak dunia. Pemerintah tetap berupaya mengendalikan pergerakan harga dengan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat serta memperkuat koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia baik di

tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga tingkat inflasi agar tetap berada pada kisaran sasaran inflasi nasional yaitu 4 ± 1 persen.

Nilai tukar rupiah dalam RAPBNP tahun 2017 diusulkan sebesar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat atau melemah dibandingkan dengan asumsinya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp 13.300 per dolar Amerika Serikat. Outlook nilai tukar rupiah tersebut mempertimbangkan potensi risiko terutama terkait rencana kebijakan moneter Amerika Serikat yang akan menaikkan kembali tingkat suku bunga acuan dan kebijakan proteksi perdagangannya. Di sisi lain, status investment grade dari beberapa lembaga rating internasional dan stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik diperkirakan akan berdampak positif terhadap aliran modal masuk ke dalam negeri dan dapat menahan risiko pelemahan nilai tukar rupiah serta sekaligus menurunkan yield surat berharga negara. Oleh karena itu, tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan sebesar 5,2 persen atau lebih rendah dari asumsi APBN tahun 2017 sebesar 5,3 persen. Berdasarkan tren peningkatan harga minyak, rata-rata ICP sampai dengan akhir tahun 2017 diperkirakan sebesar 50 dolar Amerika Serikat per barel, lebih tinggi dari asumsinya dalam APBN tahun 2017 sebesar 45 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara lifting minyak dan gas bumi sampai dengan akhir tahun diperkirakan tidak berbeda dengan asumsi lifting migas APBN tahun 2017 yaitu rata-rata mencapai 815 ribu barel per hari untuk minyak dan 1.150 ribu barel per hari setara minyak untuk gas bumi. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut tetap mengacu pada pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN 2015-2019 serta sasaran tahunan sebagaimana tercantum dalam RKP tahun 2017. Rincian asumsi dasar ekonomi makro dapat dilihat pada Tabel I.1.

Tabel 1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2016 dan 2017

No	Indikator	2015	2017	
		Realisasi	APBN	RAPBNP
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0	5,1	5,2
2	Inflasi (%)	3,0	4,0	4,3
3	Nilai Tukar Uang (Rp/US\$1)	13.370	13.300	13.400
4	Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	5,7	5,3	5,2
5	Harga Minyak Mentah (US\$/barel)	40	45	50
6	Lifting Minyak Bumi (ribu barel/hari)	829	815	815
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.180	1.150	1.150

Sumber : Nota Keuangan RAPBN-P 2017

Asumsi ekonomi makro nasional tersebut memberikan dampak ekonomi lokal di Kota Pekalongan. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2016 adalah 5,36% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016. Sementara inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2016 berada pada kisaran 2,94% lebih rendah dari inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2017 diasumsikan pada kisaran 5,5 s.d 5,7%, dan inflasi diasumsikan pada kisaran 3 + 1%.

1.3.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kota Pekalongan semester 1 Tahun Anggaran 2017, terutama dari sisi pendapatan dan penerimaan pembiayaan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kota Pekalongan diarahkan sebagai berikut:

Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2017, disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester 1 tahun 2017.
2. Penyesuaian PAD yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah khususnya pendapatan BOS dan penurunan pendapatan BLUD RSUD Bendan.
3. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan khususnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan transfer lainnya.
4. Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diakibatkan adanya penurunan Dana Hibah dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi serta penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada Perda APBD Kota Pekalongan TA 2017.

Perubahan pendapatan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 mempengaruhi Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kota Pekalongan. Adapun target pendapatan perubahan RKPD Tahun Anggaran 2017 secara lengkap dijelaskan dalam tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2 Target Pendapatan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2017

KODE	URAIAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET RKPD (PERWAL 37 Tahun 2016)	TARGET SESUDAH PERUBAHAN	TAMBAH / KURANG
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	916.020.731.000	921.460.466.000	5.439.735.000
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	178.052.210.000	191.359.428.000	13.307.218.000
411	Pendapatan Pajak Daerah	50.953.800.000	53.083.800.000	2.130.000.000
412	Hasil Retribusi Daerah	15.750.556.000	16.039.233.000	288.677.000
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.962.754.000	4.991.395.000	28.641.000
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106.385.100.000	117.245.000.000	10.859.900.000
42	DANA PERIMBANGAN	627.148.110.000	595.994.181.000	-31.153.929.000
421	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	31.385.219.000	34.382.909.000	2.997.690.000
422	Dana Alokasi Umum	457.085.256.000	457.085.256.000	0
423	Dana Alokasi Khusus	138.677.635.000	104.526.016.000	-34.151.619.000
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	110.820.411.000	134.106.857.000	43 23.286.446.000
431	Pendapatan Hibah	3.000.000.000	0	-3.000.000.000
433	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	60.418.411.000	56.119.238.000	-4.299.173.000
434	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	50.613.219.000	50.613.219.000
435	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	47.402.000.000	435 27.374.400.000	-20.027.600.000

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2017

1.3.3. Perubahan Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2017.
2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan pemberlakuan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga mempengaruhi belanja di OPD ;
3. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2017;

Perubahan kebijakan belanja dapat di golongan dalam 2 kategori, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

a). Belanja Tidak Langsung

Pada Belanja Pegawai, beberapa perubahan adalah karena penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS Bappeda berdasarkan realisasi bulan Juli 2017 dengan memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas, serta tunjangan lainnya.

b). Belanja Langsung

- 1). Kebijakan Belanja Langsung diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin Bappeda dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya seperti alokasi untuk penyesuaian honor tenaga kontrak, pembayaran air dan pembayaran listrik.
- 2). Dalam upaya menjaga pelayanan publik serta kinerja aparatur pemerintah, maka diperlukan kebijakan yang secara simultan dan berkelanjutan menopang kinerja pemerintah.
- 3). Penyesuaian anggaran yang mengalami perubahan terutama bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan penetapan APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah.
- 4). Peningkatan sarana dan prasarana penunjang mobilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 5). Penyesuaian alokasi anggaran perjalanan dinas dengan memperhatikan kebutuhan dan realisasi anggaran sampai dengan Bulan Juni 2017.
- 6). Tahun 2017 merupakan tahun kedua periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian pada beberapa program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

1.3.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan

Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan menyesuaikan dengan Laporan Realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016. SiLPA Tahun Anggaran 2016 yang semula diestimasikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 38.529.283.000,- , berdasarkan hasil audit BPK yang selanjutnya dituangkan dalam Raperda Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 96.588.898.609,-. Perhitungan lebih tersebut termasuk di dalamnya adalah SiLPA dari BLUD RSUD Bendan, BLUD Puskesmas, BLUD BKPM, dan BLUD PSPJ yang merupakan dana transitoris dan dipergunakan kembali untuk belanja langsung pada BLUD bersangkutan. SiLPA dari Tunjangan Profesi Guru dan Silpa DAK Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Non Sertifikasi) yang dianggarkan kembali pada belanja tidak langsung PD Dinas Pendidikan. Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, terdapat penyesuaian pengeluaran pembiayaan daerah yang disebabkan karena tidak terealisasinya dana hibah PDAM dari Pemerintah Pusat, dan penambahan pembentukan dana cadangan sebesar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

Perubahan kebijakan pembiayaan secara tidak langsung mempengaruhi Rencana Kerja Perubahan Bappeda Tahun 2017, dengan menyesuaikan anggaran pembiayaan perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017. Adapun anggaran pembiayaan perubahan RKPD Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3 Anggaran Pembiayaan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017

URAIAN BELANJA DAERAH	TARGET RKPD (PERWAL 37 Tahun 2016)	TARGET SESUDAH PERUBAHAN	TAMBAH / KURANG
1	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH	18.200.000.000	86.788.800.000	68.588.800.000
Penerimaan Pembiayaan	28.000.000.000	96.588.800.000	68.588.800.000
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	28.000.000.000	96.588.800.000	68.588.800.000
Pengeluaran Pembiayaan	9.800.000.000	9.800.000.000	0
Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.800.000.000	5.800.000.000	-2.000.000.000

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Bappeda, 2017 diolah

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOA PEKALONGAN SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017

2.1 Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Semester II Tahun Anggaran 2017

BAPPEDA Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 2 urusan 13 program dengan 61 kegiatan, dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan Juni 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan II
Tahun Anggaran 2017

No	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	BAPPEDA	6.237.090.000	1.492.101.722	23,92
A	Urusan Perencanaan Pembangunan	4.667.200.000	1.284.580.722	27,52
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	915.400.000	285.598.522	31,19
a	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	338.520	6,77
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50.600.000	22.080.537	43,64
c	Penyediaan jasa administrasi keuangan	31.300.000	11.950.000	38,18
d	Penyediaan jasa kebersihan kantor	40.000.000	12.701.000	31,75
e	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	19292.400	38,58
f	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000	403.200	0,81
g	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000	0	0,00
h	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.500.000	506.000	20,24
i	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.500.000	700.000	8,24
j	Penyediaan makanan dan minuman	75.000.000	17.744.000	23,66
k	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	600.000.000	199.882.865	33,31
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	140.000.000	23.285.091	12,94
a	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.000.000	12.653.800	21,09
b	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	50.000.000	15.900.000	31,80
e	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	30.000.000	3.130.000	10,43
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	73.500.000	0	0

No	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	capaian kinerja dan keuangan			
a	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	8.000.000	0	0
b	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	8.000.000	0	0
c	Monitoring dan Evaluasi SKPD	50.000.000	0	0
d	Penyusunan Renstra SKPD	7.500.000	0	0
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	37.300.000	10.764.4040	44,30
a	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	24.300.000	10.764.400	44,30
b	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	13.000.000	0	0
5	Program Pengembangan Data/Informasi	80.000.000	0	0
a	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Darah (SIPD) (bantuan Provinsi)	80.000.000	0	0
6	Program Kerjasama Pembangunan	854.000.000	384.359.900	45,00
a	Fasilitasi Kegiatan TMMD	704.000.000	337.829.000	47,99
b	Fasilitasi Karya Bhakti TNI	30.000.000	7.113.000	23,71
c	Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi)	120.000.000	39.417.900	32,85
7	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	113.000.000	11.900.000	10,53
a	Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)	78.000.000	11.900.000	15,26
b	Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Kesehatan Lingkungan)	35.000.000	0	0
8	Program perencanaan pembangunan daerah	1.460.000.000	483.766.500	33,13
a	Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi	90.000.000	9.510.000	10,57
b	Perencanaan Pembangunan Daerah	600.000.000	373.817.500	62,30
c	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	40.000.000	12.510.000	31,28
d	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	40.000.000	0	0,00
e	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	40.000.000	6.839.000	17,10
f	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	45.000.000	5.515.000	12,26
g	Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah (SIDa)	25.000.000	0	0
h	Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	75.000.000	0	0

No	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
i	Penyusunan KUA-PPAS APBD	400.000.000	0	0
j	Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD	130.000.000	75.575.000	58,13
k	Revisi RPJMD	0	0	0
9	Program perencanaan Sosial dan budaya	120.000.000	4.280.000	3,57
a	Penguatan kelembagaan PUS (Bantuan Provinsi)	70.000.000	2.610.000	3,73
b	Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)	50.000.000	1.670.000	3.34
10	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	594.000.000	52.192.600	8,79
a	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun	144.000.000	1.080.000	0,75
b	Fasilitasi NUSP-2	100.000.000	18.220.000	18,22
c	Penyusunan Rencana Tata Babngunan dan Lingkungan (RTBL)	200.000.000	32.892.600	9,40
10	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	255.000.000	20.035.000	7,86
a	Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)	75.000.000	17.425.000	23,23
b	Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs	45.000.000	0	0
c	Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat	50.000.000	0	0
d	Fasilitasi kelompok bangun perkotaan	30.000.000	2.610.000	8,70
e	Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat	55.000.000	0	0
B	Urusan Penelitian dan Pengembangan	1.569.890.000	207.521.000	13,22
1	Program Pengkajian dan Penelitian	863.850.000	156.919.050	0,00
a	Fasilitasi Riset Tematik	95.000.000	6.301.800	6,63
b	Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan	133.000.000	20.046.00	15,07
c	Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan	25.000.000	195.000	0,78
d	Seminar/Lokakarya Kelitbangan	25.000.000	0	0,00
e	Riset Unggulan Daerah	135.000.000	13.140.000	9,73
f	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	130.500.000	23.423.300	17,97
g	Fasilitasi Riset Bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembnagan	120.350.000	37.700.200	31,33
h	Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	200.000.000	56.112.750	28,06
2	Program Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah	706.040.000	50.602.400	7,16
a	Pameran Inovasi dan Kreatifitas	376.000.000	3.315.000	0,88

No	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Pembangunan Kota Pekalongan			
b	Fasilitasi Sistem Inovasi Daerah (SID)	88.440.000	16.827.000	19,03
c	Fasilitasi Pengembangan Jaringan Inovasi (SIDa)	46.600.000	6.860.000	14,72
d	Fasilitasi Pengembangan Teknopark	100.000.000	16.199.400	16,20
e	Diseminasi Hasil Penelitian dan Inovasi	30.000.000	0,00	0,00
f	Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kreativitas Teknologi	65.000.000	7.401.000	11,39

2.2. Kesesuaian program dan kegiatan di Rencana Kerja dengan APBD

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Kota Pekalongan 2016 Triwulan II terhadap pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016, dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut :

1. Jumlah program RKPD 2017 adalah 166 program dengan 2.225 kegiatan.
2. Jumlah program APBD 2017 adalah 161 program dengan 2.109 kegiatan.
3. Jumlah program yang terdapat dalam RKPD namun tidak terdapat di APBD sebanyak 6 program.

Adanya perbedaan 6 (enam) program yang terdapat dalam RKPD namun tidak terdapat dalam APBD terjadi dari proses hasil dinamika dalam pembahasan KUA-PPAS. Kegiatan yang ada dalam Program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang semula menjadi rencana kerja Dinparbudpora oleh Badan Anggaran direkomendasikan dipindahkan ke Kantor Kesbangpol, karena pencegahan narkoba yang ada dalam RKPD menjadi rencana kerja 3 (tiga) OPD yaitu Dinparbudpora, Kesbangpol dan Bagian Kesra Setda. Selanjutnya oleh Badan Anggaran DPRD direkomendasikan hanya menjadi rencana kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun program-program dalam urusan Kelautan dan Perikanan (DKP) dilakukan penyesuaian-penyesuaian dan dipindahkan dalam program lain dengan dasar kesesuaian dan keselarasan output kegiatan dengan outcome program. Selain itu, perbedaan antara program RKPD dan APBD pada urusan kelautan dan perikanan juga disebabkan karena pemindahan kewenangan sesuai dengan UU 23 Tahun 2014.

4. Jumlah kegiatan yang terdapat dalam APBD namun tidak terdapat dalam RKPD sebanyak 40 kegiatan, Dinamika tersebut secara garis besar disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemindahan kegiatan antar urusan/ antar PD, dalam rangka menjamin keselarasan kinerja kegiatan (output) dan kinerja program (outcome), sebagai konsekuensi diberlakukannya OPD baru sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
 - b. Penentuan skala prioritas dalam RKPD Tahun 2017, sehingga beberapa kegiatan di RKPD yang menempati Prioritas 2 tidak diakomodir dalam KUA-PPAS dan APBD Tahun 2017.

- c. Penyesuaian pagu definitif kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana pagu definitif DAK ditetapkan pada akhir bulan Oktober, sehingga dilakukan penyesuaian pada saat pembahasan KUA-PPAS Tahun 2017.

Berdasarkan data evaluasi RKPD di atas, bahwa program dan kegiatan yang terdapat pada renja Bappeda 2017 sesuai dengan APBD 2017. Adapun kesesuaian renja Bappeda 2017 dengan APBD 2017 dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2. Realiasi Target Kinerja Triwulan II dan Kesesuaian Renja Bappeda 2017 dengan APBD 2017

Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2017)					Realisasi Kinerja Pada Triwulan		
		4					5		
2	3	RKPD			APBD			K	Rp
		K	Satuan	Anggaran	K	Satuan	Anggaran		
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				5.503.890.000			5.688.090.000		1.492.102.172
URUSAN PENUNJANG				5.503.890.000			5.688.090.000		1.492.102.172
PERENCANAAN PEMBANGUNAN				3.934.000.000			4.118.200.000		1.284.580.722
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelaksanaan surat-menyerurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi	100	persen	891.200.000			915.400.000		285.598.522
Penyediaan jasa surat menyerurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyerurat	12	Bulan	2.400.000	12	bulan	5.000.000	6	338.520
Penyediaan jasa komunikasi, sumber	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	12	Bulan	35.000.000	12	bulan	50.600.000	6	22.080.537

daya air dan listrik	listrik								
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	Bulan	31.300.000	12	bulan	31.300.000	6	11.950.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	Bulan	40.000.000	12	bulan	40.000.000	6	12.701.000
Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12	Bulan	50.000.000	12	bulan	50.000.000	6	19.292.400
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	50.000.000	12	bulan	50.000.000	6	403.200
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	2.500.000	12	bulan	2.500.000	6	0
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	Bulan	2.500.000	12	bulan	2.500.000	6	506.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	2.500.000	12	bulan	8.500.000	6	700.000
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	Bulan	75.000.000	11	bulan	75.000.000	5	17.744.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34 2	orang/kali	600.000.000	34 2	orang/kali	600.000.000	180	199.882.865
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	10 0	persen	130.000.000			140.000.000		31.683.800

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor, BBM dan jasa pengemudi	18	unit	60.000.000	18	unit	60.000.000	9	12.653.800
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	10	unit	50.000.000	7	unit	50.000.000	3	15.900.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	20.000.000	12	Bulan	30.000.000	6	3.130.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja	100	persen	73.500.000			73.500.000		0
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bappeda	2	dokumen	8.000.000	2	dokumen	8.000.000	0	0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya	4	dokumen	8.000.000	4	dokumen	8.000.000	2	0
Monitoring dan Evaluasi SKPD	Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD	12	Bulan	50.000.000	12	Bulan	50.000.000	0	0
Penyusunan revisi renstra	Jumlah dokumen revisi renstra	1	dokumen	7.500.000	1	dokumen	7.500.000	0	0

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)	Persentase pengaduan	0	persen	37.300.000		37.300.000		10.764.400	
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	1	orang/bulan	24.300.000	1	orang/bulan	24.300.000	6	10.764.400
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Terfasilitasinya keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik	2	kali	13.000.000	2	kali	13.000.000	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	persentase ketersediaan data	10	persen	100.000.000		100.000.000		0	
	Single database daerah	10	persen						
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)	Terfasilitasinya penyusunan SIPD 8 kelompok data pembangunan daerah Kota Pekalongan	1	kegiatan	100.000.000	2	smster	100.000.000	0	0
PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	Jumlah lembaga/dunia usaha terlibat dalam pembangunan	7	Lembaga	310.000.000			310.000.000		384.359.900
Fasilitasi Kegiatan TMMD	Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan TMMD	2	kelurahan	180.000.000	2	kelurahan	180.000.000	1	337.829.000
Fasilitasi Karya Bhakti TNI	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan karya bhakti TNI	4	kelurahan	30.000.000	4	kelurahan	30.000.000	0	7.113.000
Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi)	Terfasilitasinya pengembangan kluster-kluster ekonomi Kota Pekalongan melalui kegiatan promosi dan temu bisnis	12	Bulan	100.000.000	1	lembaga	100.000.000	1	39.417.900

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah	2	dokumen	113.000.000		113.000.000		11.900.000	
Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)	Terfasilitasinya BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya penataan ruang di Kota Pekalongan	1	tahun	78.000.000	1	dokumen	78.000.000	0	11.900.000
Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)	Terfasilitasinya kelembagaan AMPL Kota Pekalongan	1	tahun	35.000.000	1	dokumen	35.000.000	0	0
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	9	dokumen	1.460.000.00 0			1.460.000.00 0		483.766.500
	Jumlah dokumen Murenbang Kel dan Kecamatan	31	dokumen						
	Persentase jumlah program RKP yang sesuai dengan Program RPJMD	10 0	persen						
	Kesesuaian progam prioritas dengan isu strategis dan analisis permasalahan	10 0	persen						
Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi	Terfasilitasinya koordinasi penyusunan laporan kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi sebagai optimalisasi fungsi pengendalian	1	tahun	90.000.000	10 0	persen	90.000.000	25 %	9.510.000

Perencanaan Pembangunan Daerah	Terfasilitasinya proses perencanaan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD 2017, RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 dan rancangan Awal RKPD 2019 serta terfasilitasinya koordinasi perencanaan dan evaluasi pengendalian	3	dokumen	600.000.000	3	dokumen	600.000.000	2	373.817.500
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1	tahun	40.000.000	1	dokumen	40.000.000	0	12.510.000
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	1	tahun	40.000.000	1	dokumen	40.000.000	0	0
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang bidang sarana dan prasarana	1	tahun	40.000.000	1	dokumen	40.000.000	0	6.839.000
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1	tahun	45.000.000	1	dokumen	45.000.000	0	5.515.000
Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah (SIDa)	Terfasilitasinya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	100	persen	0	100	persen	0		0
Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Terfasilitasinya perencanaan dan penganggaran responsif gender	1	kegiatan	75.000.000	100	persen	75.000.000	0	0

Penyusunan KUA-PPAS APBD	Terfasilitasinya penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD 2017 dan KUA PPAS APBD 2018	2	dokumen	400.000.000	2	dokumen	400.000.000	0	0
Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD	Terfasilitasinya monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD	4	triwulan	130.000.000	100	persen	130.000.000	2	75.575.000
Revisi RPJMD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021	0	dokumen	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya	1	dokumen	120.000.000			120.000.000		4.280.000
Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan	Terfasilitasinya kelembagaan PUS di Kota Pekalongan	2	dokumen	70.000.000	1	dokumen	70.000.000	0	2.610.000
Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)	jumlah bulan terkoordinasinya kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY	1	tahun	50.000.000	100	persen	50.000.000	20%	1.670.000
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PRASWIL dan SDA	2	dokumen	444.000.000			594.000.000		52.192.600
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan	Terfasilitasinya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029	1	kegiatan	144.000.000	1	dokumen	144.000.000	0	1.080.000
Fasilitasi NUSP-2	Jumlah bulan NUSP tahap 2	12	Bulan	100.000.000	100	persen	100.000.000	0	18.220.000

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)	Jumlah dokumen RTBL	1	dokumen	200.000.000	1	dokumen	350.000.000	0	32.892.600
PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PEMMAS	3	dokumen	255.000.000			255.000.000		20.035.000
Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)	Terfasilitasinya TKPD Kota Pekalongan dalam upaya koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan	12	Bulan	75.000.000	1	dokumen	75.000.000	0	17.425.000
Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs	Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs	12	Bulan	45.000.000	1	dokumen	45.000.000	0	0,00
Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat	Terfasilitasinya perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat	1	tahun	50.000.000	100	persen	50.000.000	0	0,00
Fasilitasi kelompok bangun perkotaan	Terfasilitasinya kelompok bangun perkotaan	100	persen	30.000.000	1	dokumen	30.000.000	0	2.610.000
Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat	Terfasilitasinya monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat	1	tahun	55.000.000	100	persen	55.000.000	0	0,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.569.890.000			1.569.890.000		207.521.450
PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN	Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan	4	Riset	863.850.000			863.850.000		156.919.050
Fasilitasi riset tematik	Jumlah riset tematik yang	3	riset	95.000.000	3	riset	95.000.000	0	

	dilaksanakan.							6.301.800	
Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan	Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan	1	Pusat Layanan	133.000.000	1	pusat layanan	1	20.046.000	
	Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan	1	Aplikasi		1	aplikasi	1		
	Jumlah FGD/Workshop Kelitbangan	5	kali		5	kali	3		
Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan	Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan	1	jurnal	25.000.000	1	jurnal	25.000.000	0	195.000
Seminar/Lokakarya Kelitbangan	Jumlah seminar/Lokakarya Kelitbangan.	1	kali	25.000.000	1	kali	25.000.000	0	0,00
Riset unggulan daerah	Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi	5	riset	135.000.000	5	riset	135.000.000	2	13.140.000
Fasilitasi dewan riset daerah	Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun	2	riset/kajian	130.500.000	2	riset/kajian	130.500.000	0	23.423.300
Fasilitasi riset bersama dengan lembaga penelitian dan pengembangan	Jumlah Kajian yang tersusun	2	riset/kajian	120.350.000	2	riset/kajian	120.350.000	1	37.700.200
Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan	Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat	4	kali	200.000.000	4	kali	200.000.000	2	56.112.750
PROGRAM PENGEMBANGAN IPTEK DAN INOVASI DAERAH	Peningkatan jumlah teknopreneur	18	teknopreneur	706.040.000			706.040.000		50.602.400

Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan	Jumlah Stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan	27	stand	376.000.000	27	stand	376.000.000	0	3.315.000
Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID)	Jumlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang terfasilitasi	5	kali	88.440.000	5	kali	88.440.000	2	16.827.000
Fasilitasi pengembangan jaringan inovasi (SIDa)	Jumlah Penghargaan Inovasi	2	kategori	46.600.000	2	kategori	46.600.000		6.860.000
Fasilitasi Pengembangan Teknopark	Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark yang terfasilitasi	8	kali	100.000.000	8	kali	100.000.000	2	16.199.400
Diseminasi hasil penelitian dan inovasi	Jumlah Inovasi Teknologi yang tersosialisasikan/terdesiminasikan dari hasil Litbang yang ada	1	teknologi	30.000.000	1	teknologi	30.000.000	0	0,00
Fasilitasi kegiatan pengembangan kreatifitas teknologi	Pemenang Krenova yang terseleksi	3	Pemenang	65.000.000	3	pmng	65.000.000	3	7.401.000
	Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi Pemerintah Kota Pekalongan	1	Event		1	Event			

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinerginya antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka memadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota tetapi masih belum optimal

Melihat kondisi tersebut, BAPPEDA Kota Pekalongan selaku instansi Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kota dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2017 sampai dengan triwulan II meski secara keuangan baru tercapai 23,92%, tetapi pencapaian secara fisik sudah tercapai sekitar 50%. Capaian fisik yang telah dilaksanakan adalah:

1. Terasiliasinya pelaksanaan program administrasi perkantoran sampai dengan bulan Juli 2017;
2. Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I yang dilaksanakan di Kelurahan Setono;
3. Pelaksanaan operasi pasar terhadap kandungan garam beryodium di 6 pasar tradisional se Kota Pekalongan;
4. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018;
5. Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017;
6. Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Perangkat Daerah;
7. Tersusunnya RTBL di 2 tempat/lokasi.
8. Partisipasi pameran Produk Unggulan Daerah FEDEP Kota Pekalongan tingkat Karesidenan Pekalongan;

9. Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang ekonomi dan perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana semester I.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
BAPPEDA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2017 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, Kegiatan yang dihapus, Penambahan Kegiatan baru, Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi, Kelompok Sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 62 kegiatan, terdapat 37 kegiatan (66,6%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 20 kegiatan (25%) mengalami perubahan (8 kegiatan mengalami pengurangan dan 12 kegiatan mengalami penambahan) dan 4 kegiatan (6%) yang dihapus, serta usulan kegiatan baru sebanyak 1 kegiatan (1,6%) di Perubahan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2017. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan pada Renja Perubahan BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2017

No.	Perubahan	Jumlah Kegiatan	Keterangan
01	02	03	04
1.	Kegiatan yang diusulkan tidak mengalami perubahan	37 kegiatan	Kegiatan rutin dan teknis
2.	Kegiatan yang diusulkan berkurang pagu anggaran/target kinerja	8 kegiatan	Karena adanya efisiensi belanja
3.	Kegiatan yang diusulkan bertambah pagu anggaran/target kinerja	12 kegiatan	Karena adanya penambahan target kinerja maupun penyesuaian standarisasi harga
4.	Kegiatan yang diusulkan dihapus/ hilang pagu anggaran/target kinerja	4 kegiatan	2 kegiatan sudah masuk dalam kegiatan lain, 1 kegiatan belum dapat dilaksanakan tahun 2017 dan 1 kegiatan belum ada petunjuk pelaksanaannya di tingkat provinsi.

No.	Perubahan	Jumlah Kegiatan	Keterangan
5	Kegiatan baru yang diusulan	1 kegiatan	Perlunya kelanjutan kegiatan Audit dan surveillance ISO yang sebelumnya di fasilitasi bagian organisasi Setda

1. Kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam Renja Tahun 2017 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif pada Perubahan Renja Tahun 2017 sebanyak 37 kegiatan. Adapun kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran pada renja perubahan seperti tersebut dalam tabel 3.2. dibawah ini.

Tabel. 3.2 Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran

Pada Renja Perubahan Tahun 2017

No	Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah / Berkurang
		Penetapan Renja	Perubahan Renja	
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	31.300.000	31.300.000	0
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	40.000.000	40.000.000	0
3	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	50.000.000	0
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000	50.000.000	0
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000	2.500.000	0
6	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.500.000	2.500.000	0
7	Penyediaan makanan dan minuman	75.000.000	75.000.000	0
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	600.000.000	600.000.000	0
9	Penyusunan renja dan	8.000.000	8.000.000	0

	LEPPK-SKPD			
10	Penyusunan RKA,LAKIp dan laporan-laporan keuangan SKPD	8.000.000	8.000.000	0
11	Penyusunan revisi renstra	7.500.000	7.500.000	0
12	Penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD	24.300.000	24.300.000	0
13	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	13.000.000	13.000.000	0
14	Fasilitasi kelembagaan AMPL	35.000.000	35.000.000	0
15	Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi	90.000.000	90.000.000	0
16	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	40.000.000	40.000.000	0
17	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	40.000.000	40.000.000	0
18	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	40.000.000	40.000.000	0
19	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	45.000.000	45.000.000	0
20	Fasilitasi perencanaan dan penganaggaran responsif gender	75.000.000	75.000.000	0
21	Penyusunan KUA-PPAS APBD	400.000.000	400.000.000	0
22	Pengembangan kelembagaan forum pendidikan untuk semua (PUS) Kota Pekalongan	70.000.000	70.000.000	0
23	Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Banprov)	50.000.000	50.000.000	0

24	Revisi rencana tata ruang wilayah Kota Pekalongan	144.000.000	144.000.000	0
25	Fasilitasi NUSP-2	100.000.000	100.000.000	0
26	Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat	50.000.000	50.000.000	0
27	Fasilitasi kelompok bangun perkotaan	30.000.000	30.000.000	0
28	Penyusunan jurnal penelitian dan pengembangan	25.000.000	25.000.000	0
29	Seminar/lokakarya kelitbangan	25.000.000	25.000.000	0
30	Fasilitasi dewan riset daerah	130.500.000	130.500.000	0
31	Fasilitasi riset bersama dengan lembaga penelitian dan pengembangan	120.500.000	120.500.000	0
32	Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan	200.000.000	200.000.000	0
33	Pameran inovasi dan kreatifitas pembangunan Kota Pekalongan	376.000.000	376.000.000	0
34	Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID)	88.440.000	88.440.000	0
35	Fasilitasi pengembangan jaringan inovasi (SIDa)	46.600.000	46.600.000	0
36	Diseminasi hasil pemelitian dan inovasi	30.000.000	30.000.000	0
37	Fasilitasi kegiatan pengembangan kreatifitas teknologi	65.000.000	65.000.000	0

2. Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam Renja Tahun 2017 dan mengalami pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif sebanyak 8 kegiatan. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.3. dibawah ini.

Tabel. 3.3. Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran
Pada Renja Perubahan 2017

No	Kegiatan	PAGU (Rp)		Berkurang
		Penetapan Renja	Perubahan Renja	
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.000.000	52.500.000	7.500.000
2	Monitoring dan Evaluasi SKPD	50.000.000	45.000.000	5.000.000
3	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan provinsi)	100.000.000	80.000.000	20.000000
4	Fasilitasi karya Bhakti TNI	30.000.000	8.000.000	22.000.000
5	Fasilitasi riset tematik	95.000.000	94.400.000	600.000
6	Fasilitasi jaringan penelitian dan pengembangan Kota Pekalongan	133.000.000	128.200.000	4.800.000
7	Riset unggulan daerah	135.000.000	133.700.000	1.300.000
8	Fasilitasi pengembangan tecknopark	100.000.000	98.400.000	1.600.000

3. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam Renja Tahun 2017 dan mengalami penambahan baik target kinerja maupun pagu indikatif sebanyak 12 kegiatan. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4. Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran
Pada Renja Perubahan 2017

No	Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah
		Penetapan Renja	Perubahan Renja	
1	Penyediaan jasa surat	2.400.000	5.000.000	2.600.000

	menyurat			
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	35.000.000	51.700.000	16.700.000
3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000	8.500.000	6.000.000
4	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5.000.000	60.700.000	10.700.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	20.000.000	30.000.000	10.000.000
6	Fasilitasi kegiatan TMMD	180.000.000	1.072.874.000	892.874.000
7	Fasilitasi FEDEP	100.000.000	120.000.000	20.000.000
8	Fasilitasi BKPRD	78.000.000	83.500.000	5.500.000
9	Perencanaan Pembangunan Daerah	600.000.000	750.000.000	150.000.000
10	Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD	130.000.000	150.000.000	20.000.000
11	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)	200.000.000	350.000.000	150.000.000
12	Fasilitasi TKPKD	75.000.000	125.000.000	50.000.000

4. Kegiatan yang mengalami penghapusan

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang sebelumnya ada dalam Rencana Kerja Tahun 2017, namun diusulkan untuk dihapuskan dalam Perubahan Renja Tahun 2017 ini sebanyak 4 kegiatan. Kegiatan yang dihapus dapat dilihat dalam tabel 3.5. dibawah ini.

Tabel 3.5. Kegiatan Yang Dihapus Pada Renja Perubahan Tahun 2017

No	Kegiatan	PAGU		Berkurang
		Penetapan Renja	Perubahan Renja	
1	Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah (SIDa)	45.000.000	0	45.000.000
2	Monitoring dan evaluasi capaian MDG's	45.000.000	0	45.000.000

3	Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat	55.000.000	0	55.000.000
4	Revisi RPJMD	400.000.000	0	400.000.000

5. Kegiatan baru di perubahan

Kegiatan yang masuk kategori ini sebanyak 1 kegiatan, yaitu kegiatan Audit dan Surveillance ISO. Kegiatan baru ini dalam rangka melanjutkan proses sertifikasi ISO yang pada Tahun 2016 sudah di fasilitasi oleh Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, karena ada ketentuan sertifikasi Iso 9001 bahwa setiap tahun harus dilakukan verifikasi ulang. Kegiatan baru dapat dilihat dalam Tabel 3.6. dibawah ini.

Tabel 3.6. Kegiatan Baru Pada Renja Perubahan 2017

No	Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah
		Penetapan Renja	Perubahan Renja	
1	Audit dan surveilaince iso	0	35.000.000	35.000.000

3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2017 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2017.
2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan pemberlakuan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga mempengaruhi belanja di OPD ;
3. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2017.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja Bappeda Kota Pekalongan tahun 2017 terlihat dalam tabel 3.7. dibawah ini:

Tabel. 3.7. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Perubahan Renja 2017

Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	PENETAPAN RENJA			PERUBAHAN RENJA			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)
	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RENJA
1	2	3	4	6	7	8	9=8-4
URUSAN PENUNJANG			5.848.890.000,00			6.710.464.000,00	861.574.000,00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN			4.279.000.000,00			5.148.874.000,00	869.874.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			891.200.000,00			916.500.000,00	25.300.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.400.000,00	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	5.000.000,00	2.600.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	35.000.000,00	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	51.700.000,00	16.700.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	31.300.000,00	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	31.300.000,00	0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	40.000.000,00	jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	40.000.000,00	0,00
Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	50.000.000,00	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	50.000.000,00	0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	50.000.000,00	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	50.000.000,00	0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.500.000,00	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.500.000,00	0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	2.500.000,00	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	181 buah	2.500.000,00	0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000,00	jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	8.500.000,00	6.000.000,00

Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	PENETAPAN RENJA			PERUBAHAN RENJA			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)
	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RENJA
1	2	3	4	6	7	8	9=8-4
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	75.000.000,00	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	75.000.000,00	0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	342 orang/kali	600.000.000,00	Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	380 orang/kali	600.000.000,00	0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			130.000.000,00			143.200.000,00	13.200.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor, BBM dan jasa pengemudi	18 unit	60.000.000,00	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor, BBM dan jasa pengemudi	19 unit	52.500.000,00	-7.500.000,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	10 unit	50.000.000,00	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	9 unit	60.700.000,00	10.700.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	20.000.000,00	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	30.000.000,00	10.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			73.500.000,00			68.500.000,00	-5.000.000,00
Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bappeda	2 dokumen	8.000.000,00	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	6 dokumen	8.000.000,00	0,00
				Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bappeda	0 dokumen		

Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	PENETAPAN RENJA				PERUBAHAN RENJA			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)
	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RENJA
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJIP dan laporan keuangan lainnya	4 dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJIP dan laporan keuangan lainnya	6 dokumen 0 dokumen	8.000.000,00	0,00
Monitoring dan Evaluasi SKPD	Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD	12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD	12 bulan 0 bulan	45.000.000,00	-5.000.000,00
Penyusunan revisi renstra	Jumlah dokumen revisi renstra	1 dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	Jumlah dokumen revisi renstra	1 dokumen	7.500.000,00	0,00
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)			37.300.000,00	37.300.000,00			72.300.000,00	35.000.000,00
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	1 orang/bulan	24.300.000,00	24.300.000,00	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	1 orang/bulan	24.300.000,00	0,00
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Terfasilitasinya keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik	2 kali	13.000.000,00	13.000.000,00	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik Terfasilitasinya keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik	2 kali 0 kali	13.000.000,00	0,00
Audit dan surveillance ISO			0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil audit/surveillance ISO	1 dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00

Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	PENETAPAN RENJA			PERUBAHAN RENJA			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)
	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RENJA
1	2	3	4	6	7	8	9=8-4
Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)	Terfasilitasinya BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya penataan ruang di Kota Pekalongan	1 tahun	78.000.000,00	Jumlah dokumen laporan BKPRD Kota Pekalongan Jumlah dokumen penataan ruang di Kota Pekalongan melalui BKPRD Kota Pekalongan	1 dokumen 0 dokumen	83.500.000,00	5.500.000,00
Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)	Terfasilitasinya kelembagaan AMPL Kota Pekalongan	1 tahun	35.000.000,00	Jumlah dokumen pemanfaatan AMPL Kota Pekalongan	1 dokumen	35.000.000,00	0,00
Program perencanaan pembangunan daerah			1.805.000.000,00			1.630.000.000,00	-175.000.000,00
Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi	Terfasilitasinya koordinasi penyusunan laporan kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi sebagai optimalisasi fungsi pengendalian	1 tahun	90.000.000,00	Jumlah rakor perencanaan dan evaluasi kegiatan dana APBN dan APBD Provinsi Terfasilitasinya koordinasi penyusunan laporan kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi sebagai optimalisasi fungsi pengendalian	4 rakor 0 persen	90.000.000,00	0,00
Perencanaan Pembangunan Daerah	Terfasilitasinya proses perencanaan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD 2017, RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 dan rancangan Awal RKPD 2019 serta terfasilitasinya koordinasi perencanaan dan evaluasi pengendalian	3 dokumen	600.000.000,00	Terfasilitasinya proses perencanaan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD 2017, RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 dan rancangan Awal RKPD 2019 serta terfasilitasinya koordinasi perencanaan dan evaluasi pengendalian	0 dokumen	750.000.000,00	150.000.000,00
				jumlah dokumen penyusunan Perubahan RKPD 2017, RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 dan rancangan Awal RKPD 2019 serta terfasilitasinya koordinasi perencanaan dan evaluasi pengendalian	3 dokumen		

Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	PENETAPAN RENJA			PERUBAHAN RENJA			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)
	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RENJA
1	2	3	4	6	7	8	9=8-4
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 tahun	40.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen	40.000.000,00	0,00
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	1 tahun	40.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	1 dokumen	40.000.000,00	0,00
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	1 tahun	40.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	1 dokumen	40.000.000,00	0,00
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	1 tahun	45.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	45.000.000,00	0,00
Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah (SIDa)	Terfasilitasinya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	100 %	45.000.000,00	Terfasilitasinya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	100 persen	0,00	-45.000.000,00
Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Terfasilitasinya perencanaan dan penganggaran responsif gender	1 kegiatan	75.000.000,00	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender	1 dokumen	75.000.000,00	0,00
				Terfasilitasinya perencanaan dan penganggaran responsif gender	0 persen		
Penyusunan KUA-PPAS APBD	Terfasilitasinya penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD 2017 dan KUA PPAS APBD 2018	2 dokumen	400.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (KUA-PPAS) tahun 2017 dan 2018	2 dokumen	400.000.000,00	0,00
				Terfasilitasinya penyusunan KUA-PPAS perubahan APBD 2017 dan KUA-PPAS APBD 2018	0 dokumen		
Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD	Terfasilitasinya monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD	4 triwulan	130.000.000,00	Jumlah dokumen monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD	4 dokumen	150.000.000,00	20.000.000,00
				Terfasilitasinya monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD	0 persen		
Revisi RPJMD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021	1 dokumen	300.000.000,00	Jumlah dokumen revisi RPJMD yang disusun	0 dokumen	0,00	-300.000.000,00

Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	PENETAPAN RENJA			PERUBAHAN RENJA			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)
	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RENJA
1	2	3	4	6	7	8	9=8-4
Program perencanaan sosial dan budaya			120.000.000,00			120.000.000,00	0,00
Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan	Terfasilitasinya kelembagaan PUS di Kota Pekalongan	2 dokumen	70.000.000,00	Jumlah dokumen Pendidikan Untuk Semua di Kota Pekalongan	1 dokumen	70.000.000,00	0,00
Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)	jumlah bulan terkoordinasinya kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY	1 tahun	50.000.000,00	Jumlah pasar yang dilakukan operasi pasar garam beryodium	7 pasar	50.000.000,00	0,00
				Persentase terkoordinasinya kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY	0 persen		
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam			444.000.000,00			594.000.000,00	150.000.000,00
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan	Terfasilitasinya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029	1 kegiatan	144.000.000,00	Jumlah dokumen revisi rencana tata ruang wilayah kota pekalongan tahun 2009-2029	1 dokumen	144.000.000,00	0,00
				Terfasilitasinya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029	0 dokumen		
Fasilitasi NUSP-2	Jumlah bulan NUSP tahap 2	12 bulan	100.000.000,00	Jumlah bulan fasilitasi NUSP	12 bulan	100.000.000,00	0,00
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)	Jumlah dokumen RTBL	1 dokumen	200.000.000,00	Jumlah dokumen RTBL	2 dokumen	350.000.000,00	150.000.000,00
Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat			255.000.000,00			205.000.000,00	-50.000.000,00
Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)	Terfasilitasinya TKPKD Kota Pekalongan dalam upaya koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan	12 bulan	75.000.000,00	jumlah dokumen TKPKD Kota Pekalongan dalam upaya koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	125.000.000,00	50.000.000,00
				Terfasilitasinya TKPKD Kota Pekalongan dalam upaya koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan	0 dokumen		

Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	PENETAPAN RENJA			PERUBAHAN RENJA			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)
	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RENJA
1	2	3	4	6	7	8	9=8-4
Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs	Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs	12 bulan	45.000.000,00	Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs	1 dokumen	0,00	-45.000.000,00
Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat	Terfasilitasinya perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat	1 tahun	50.000.000,00	Persentase fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat	100 persen	50.000.000,00	0,00
Fasilitasi kelompok bangun perkotaan	Terfasilitasinya kelompok bangun perkotaan	100 %	30.000.000,00	Jumlah dokumen rekomendasi kelompok bangun perkotaan	1 dokumen	30.000.000,00	0,00
Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat	Terfasilitasinya monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat	1 tahun	55.000.000,00	Persentase monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat	100 persen	0,00	-55.000.000,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.569.890.000,00			1.561.590.000,00	-8.300.000,00
Program pengkajian dan penelitian			863.850.000,00			857.150.000,00	-6.700.000,00
Fasilitasi riset tematik	Jumlah riset tematik yang dilaksanakan.	3 riset	95.000.000,00	Jumlah riset tematik yang dilaksanakan.	3 riset	94.400.000,00	-600.000,00
Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan	Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan	1 Pusat Layanan	133.000.000,00	Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan	1 Pusat Layanan	128.200.000,00	-4.800.000,00
	Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan	1 Aplikasi		Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan	1 Aplikasi		
	Jumlah FGD/Workshop Kelitbangan	5 kali		Jumlah FGD/Workshop Kelitbangan	5 kali		
Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan	Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan	1 jurnal	25.000.000,00	Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan	1 jurnal	25.000.000,00	0,00
Seminar/Lokakarya Kelitbangan	Jumlah seminar/Lokakarya Kelitbangan.	1 kali	25.000.000,00	Jumlah seminar/Lokakarya Kelitbangan.	1 kali	25.000.000,00	0,00
Riset unggulan daerah	Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi	5 riset	135.000.000,00	Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi	5 riset	133.700.000,00	-1.300.000,00
Fasilitasi dewan riset daerah	Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun	2 riset/kajian	130.500.000,00	Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun	2 riset/kajian	130.500.000,00	0,00

Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	PENETAPAN RENJA			PERUBAHAN RENJA			Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)
	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RENJA
1	2	3	4	6	7	8	9=8-4
Fasilitasi riset bersama dengan lembaga penelitian dan pengembangan	Jumlah Kajian yang tersusun	2 kajian/riset	120.350.000,00	Jumlah Kajian yang tersusun JUmlah sumur bor terbangun	2 kajian/riset 1 unit	120.350.000,00	0,00
Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan	Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat	4 kali	200.000.000,00	Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat	4 kali	200.000.000,00	0,00
Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah			706.040.000,00			704.440.000,00	-1.600.000,00
Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan	Jumlah Stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan	27 stand	376.000.000,00	Jumlah Stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan JUmlah event Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan	0 stand 1 event	376.000.000,00	0,00
Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID)	JUmlah FGD/Raker/Rakor/ Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang terfasilitasi	5 kali	88.440.000,00	JUmlah FGD/Raker/Rakor/ Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang terfasilitasi	5 kali	88.440.000,00	0,00
Fasilitasi pengembangan jaringan inovasi (SIDa)	Jumlah Penghargaan Inovasi	2 kategori	46.600.000,00	Jumlah Penghargaan Inovasi	0 kategori	46.600.000,00	0,00
				JUmlah kategori penghargaan inovasi	2 kategori		
Fasilitasi Pengembangan Technopark	Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark yang terfasilitasi	8 kali	100.000.000,00	Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark yang terfasilitasi	8 kali	98.400.000,00	-1.600.000,00
Diseminasi hasil penelitian dan inovasi	Jumlah Inovasi Teknologi yang tersosialisasikan/terdeseminasikan dari hasil Litbang yang ada	1 teknologi	30.000.000,00	Jumlah Inovasi Teknologi yang tersosialisasikan/terdeseminasikan dari hasil Litbang yang ada	1 teknologi	30.000.000,00	0,00
Fasilitasi kegiatan pengembangan kreatifitas teknologi	Pemenang Krenova yang terseleksi	3 Pemenang	65.000.000,00	Pemenang Krenova yang terseleksi	3 Pemenang	65.000.000,00	0,00
	Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi Pemerintah Kota Pekalongan	1 Event		Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi Pemerintah Kota Pekalongan	0 Event		
				Jumlah keikutsertaan Pameran Produk Inovasi	1 event		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2017 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2017 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017.
2. Perubahan RKPD Tahun 2017 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah periode berikutnya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan

Pekalongan, 20 Juli 2017

Kepala Bappeda Kota Pekalongan


Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, MSc
Pembina Tk.I
NIP. 1965071992032014